

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, berikut ini dikemukakan kesimpulan dari Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah di Provinsi Sumatera Barat.

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan menggunakan Indeks Theil selama periode tahun 2001 hingga 2015 sangat fluktuatif. Pada tahun 2001-2009 mengalami penurunan ketimpangan dari sebesar 0,0312 menjadi sebesar 0,0252. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2010 hingga 2015 dari sebesar 0,0276 menjadi sebesar 0,0286. Sumber ketimpangan pembangunan ekonomi berdasarkan analisis Indeks Theil selama kurun waktu tahun 2001 hingga 2015 berasal dari ketimpangan antar kabupaten/kota (*between*) dengan persentase sebesar 68 hingga 78 persen dari total ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan 22 hingga 32 persen sumber ketimpangan berasal dari ketimpangan dalam kabupaten/kota (*within*).
2. Hasil regresi menunjukkan bahwa sekitar 94,56 persen tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan menggunakan Indeks Theil dapat diterangkan oleh variabel Gempa Bumi, Dana Perimbangan, Investasi swasta, Mutu Pendidikan, Mutu Kesehatan dan Kepadatan Penduduk. Sedangkan sisanya sebesar 5,44 persen diterangkan oleh variabel lain diluar model. Pengaruh masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: (a) Gempa Bumi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Sumatera Barat; (b) Dana Perimbangan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Sumatera Barat; (c) Investasi Swasta mempunyai pengaruh yang negatif namun dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Sumatera Barat; (d) Mutu Pendidikan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di

Sumatera Barat; (e) Mutu Kesehatan mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Sumatera Barat; dan (f) Kepadatan Penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Sumatera Barat.

3. Rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat adalah: (a) penggunaan dana perimbangan yang efektif dan efisien; b) meningkatkan investasi melalui kebijakan insentif dibidang penanaman modal; c) menambah jumlah guru; d) menambah jumlah tenaga kesehatan; serta e) pemerataan sebaran jumlah penduduk.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan permasalahan yang ditemukan maka disarankan:

1. Pemerintah daerah hendaknya tidak terfokus untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dalam waktu cepat karena tanpa diiringi upaya pemerataan dan keberlanjutan pembangunan, pertumbuhan yang tidak berkualitas menjadi sangat rapuh dan memperlebar ketimpangan pembangunan ekonomi. Kemajuan aktifitas perekonomian juga ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang menjalankannya. Karena itu perlu adanya fokus pada pembangunan sumberdaya manusia dari segi pendidikan, kesehatan dan distribusi pendapatan terutama di daerah tertinggal dan sedang berkembang. Meningkatnya pembangunan manusia akan berdampak positif terhadap kapasitas sumber daya manusia yang produktif, yaitu sumberdaya manusia yang sehat, berpendidikan dan terampil sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah output.
2. Dalam penelitian ini hanya mengkaji 6 variabel independen saja, sehingga masih banyak kemungkinan variabel yang bisa ditambahkan kedepannya yang berkenaan dengan ketimpangan pembangunan ekonomi yang dapat menjelaskan lebih kongrit mengapa ketimpangan pembangunan itu selalu ada.